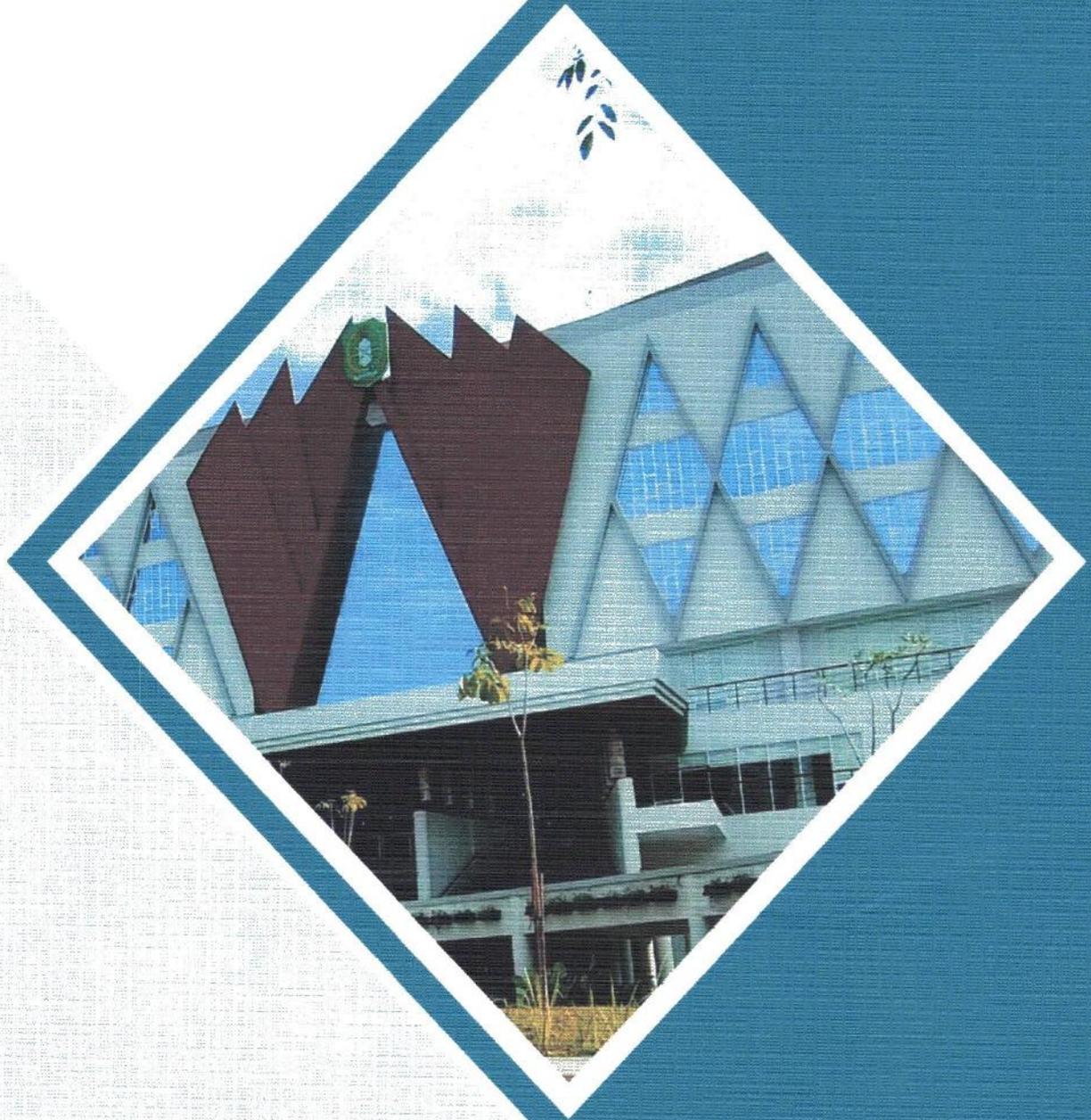




**DPMP TSP**  
Provinsi Kalimantan Barat

# LKPJ

LAPORAN KETERANGAN  
PERTANGGUNGJAWABAN



Tahun Anggaran  
**2024**

Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi Kalimantan Barat

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur senantiasa kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat, barokah, karunia, dan hidayah-Nya sehingga tersusunnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun 2023 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 41 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat.

Sesuai Peraturan Gubernur tersebut ditegaskan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan tugas dimaksud wajib dilaporkan melalui LKPJ yang disusun setiap akhir tahun anggaran. Penyusunan LKPJ pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 telah berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat dan memuat gambaran penyelenggaraan berbagai Program dan Kegiatan selama tahun 2023 secara jelas dan terukur.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang memberikan kritik, saran ataupun masukan yang berharga dalam penyusunan LKPJ Akhir Tahun 2023 ini. Kami berharap laporan ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi oleh Pemerintah dalam rangka makin memantapkan pelaksanaan otonomi daerah khususnya di Provinsi Kalimantan Barat.

Pontianak, Januari 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan terpadu Satu Pintu,



Hendra S.Sos  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19680925 198908 1 001

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>		<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>		<b>iii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>		<b>1</b>
<b>1.1 DASAR HUKUM .....</b>		<b>1</b>
<b>1.2 DATA UMUM PERANGKAT DAERAH.....</b>		<b>1</b>
- <b>Jumlah Pegawai .....</b>		<b>3</b>
- <b>Realisasi Pendapatan .....</b>		<b>5</b>
- <b>Realisasi Belanja .....</b>		<b>5</b>
<b>BAB II : PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PERUBAHAN (APBD-P) PERANGKAT DAERAH.....</b>		<b>10</b>
<b>BAB III : HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH .....</b>		<b>39</b>
<b>3.1 Pelaksanaan Urusan.....</b>		<b>39</b>
<b>3.2 Kebijakan Strategis yang Dilaksanakan .....</b>		<b>44</b>
<b>BAB V : PENUTUP.....</b>		<b>49</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Dasar Hukum**

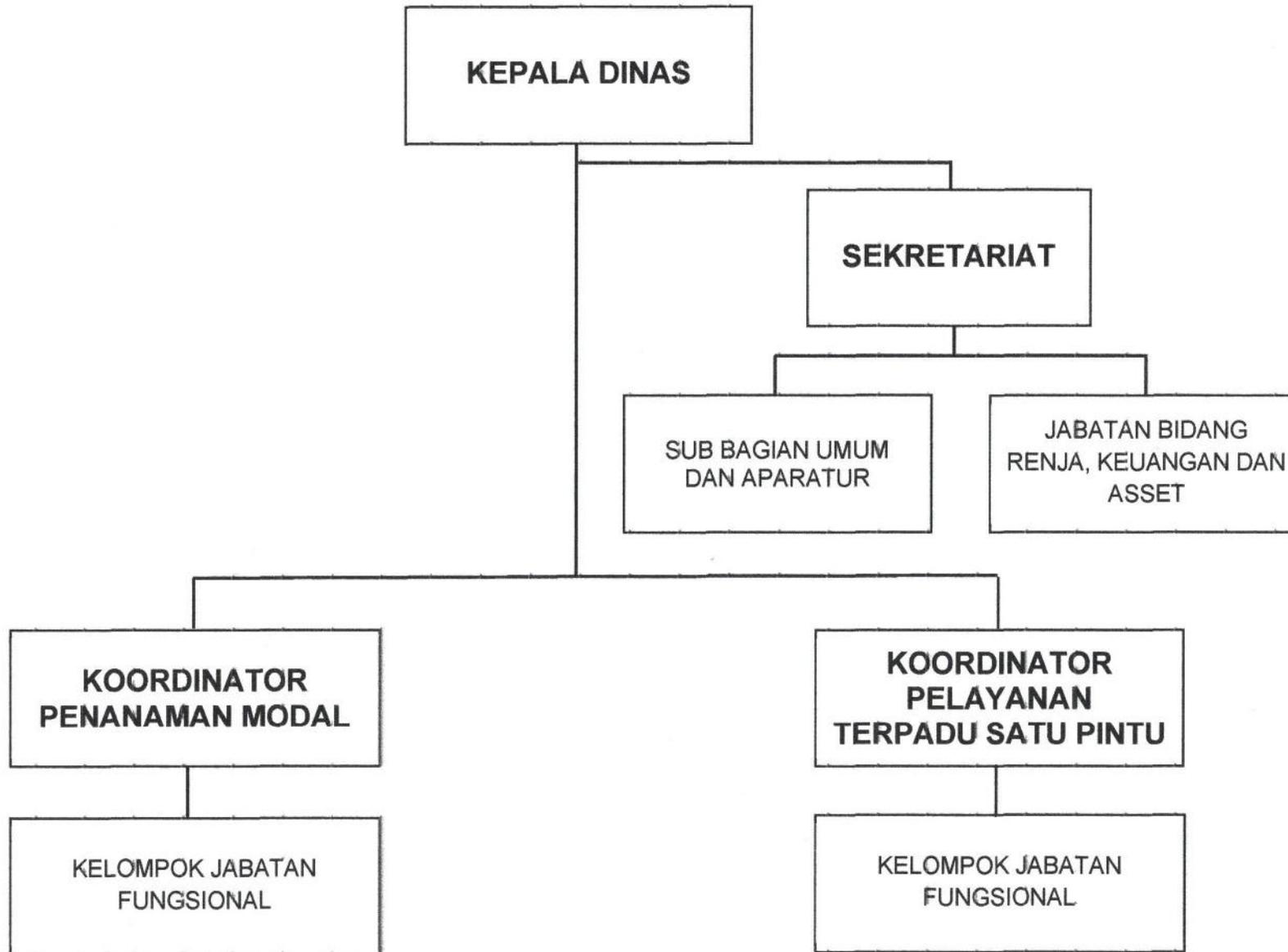
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 41 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat. Secara yuridis ditegaskan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **1.2 Data Umum Perangkat Daerah**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 41 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat, terdiri dari :

- 1) Kepala Dinas;
- 2) Sekretariat, yang dipimpin oleh Sekretaris yang membawahi 1 Sub Bagian dan Jabatan Bidang Rencana Kerja, Keuangan dan Asset yaitu:
  - a. Sub Bagian Umum dan Aparatur;
  - b. Jabatan Bidang Rencana kerja, Keuangan dan Asset
- 3) Urusan Penanaman Modal yang dipimpin oleh Koordinator yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- 4) Urusan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dipimpin oleh Koordinator yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.

## STRUKTUR ORGANISASI DPMPTSP PROV. KALBAR



### - Jumlah Pegawai

Jumlah pegawai yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat per Desember 2023 berjumlah 47 orang, dengan susunan sebagai berikut :

- Eselon II Berjumlah 1 (satu) orang
- Eselon III Berjumlah 1 (satu) orang
- Eselon IV Berjumlah 1 (satu) orang
- Fungsional Tertentu Berjumlah 22 (dua puluh dua) orang
- Staf non eselon Berjumlah 21 (dua puluh satu) orang

Tabel 1. Nama Pegawai, Pangkat/ Golongan, Jabatan, Kualifikasi Pendidikan, Pendidikan dan Pelatihan Struktural

No	Nama / NIP	Pangkat / Golongan	Jabatan	Pendidikan	Diklat Strukt	Jenis Kel.
1)	Hendra. S. Sos 19680925 196908 1 001	Pembina Utama Madya / IVd	Kepala Dinas	Strata 1	4,3,2	L
2)	Nelly, S.Pd., MPA 19800122 200502 2 004	Pembina / Iva	Sekretaris	Strata 2	4	P
3)	Eko Ardianto, S.IP., M.Si 19700714 199010 1 001	Pembina Tk. I / IVb	Analisis Kebijakan Ahli Madya	Strata 2	4,3	L
4)	Drs. Idrianto, M.Si 19680603 198803 1 005	Pembina Tk. I/ IVb	Penata Perizinan Ahli Madya	Strata 2	4,3	L
5)	Dayang Yuli Samsiah, S.IP, MPP 19680709 198803 2 005	Pembina Tk. I/ IVb	Penata Perizinan Ahli Madya	Strata 2	4,3	P
6)	Teresia Widi. SE.MA.M.Ec.Dev 19791208 200003 2 002	Pembina Tk. I/ IVb	Analisis Kebijakan Ahli Madya	Strata 2	4	P
7)	Syamsuwir, S.Sos, M.Si 19670804 199003 1 006	Pembina Tk. I/ IVb	Analisis Kebijakan Ahli Madya	Strata 2	4	L
8)	Rosita Kartikasari, SE, MM 19670326 199302 2 003	Pembina / IVA	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Strata 2	4	P
9)	Rini Herwita Koesma, SE, MM 19740507 199803 2 005	Pembina / IVA	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Strata 2	4	P
10)	Indra Juwisa. S.Hut 19740623 200604 1 005	Penata Tk I/ III d	Penata Perizinan Ahli Muda	Strata 1		L
11)	Franky Simanjuntak, S.STP, M.A.P 19900828 201010 1 002	Penata Tk I/ III d	Penata Perizinan Ahli Muda	Strata 1		L
12)	Uray Iswan, SE 19700330 199202 1 001	Penata Tk. I/ III d	Pranata Hubungan Masyarakat Muda	Strata 1	4	L
13)	Fery, ST, MAP 19780223 200502 1 003	Penata / III c	Penata Perizinan Ahli Muda	Strata 2	4	L
14)	Budi Setiawan. SE. MM 19680620 198903 1 008	Pembina/ IVA	Penata Perizinan Ahli Muda	Strata 2		L
15)	Widatun. S.Sos 19660129 199203 2 002	Penata Tk. I/ III d	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Strata 1		P
16)	D.Doni Sudihatmoko. SE 19780827 201001 1 014	Penata Tk. I/ III d	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Strata 1		L
17)	Wilhelius, S.STP 19920503 201406 1 001	Penata Muda TK I/III b	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Strata 1		L
18)	Syarifah Lilis 19660115 198603 2 013	Penata Muda Tk. I / III b	Pengelola Keuangan	SMA		P
19)	Nurhayati 19660909 198701 2 005	Penata Muda Tk. I / III b	Pengadministrasi Umum	SMA		P

No	Nama / NIP	Pangkat / Golongan	Jabatan	Pendidikan	Diklat Strukt	Jenis Kel.
20)	Eka Susilawati 19660919 198703 2 007	Penata Muda Tk. I / IIIb	Pengadministrasi Perizinan	SMA		P
21)	Maria Diana. SE, MAP 19860326 200701 2 002	Penata / IIIc	Analisis Dokumen Perizinan	Strata 2		P
22)	Nyemas Misna Ariyana. S.STP, M.A.P 19930623 201406 2 001	Penata / IIIc	Analisis Dokumen Perizinan	Strata 1		P
23)	Tri Utomo. SE 19720913 201001 1 005	Penata Muda Tk. I / IIIb	Bendahara	Strata 1		L
24)	Jecklin. SE 19770628 201001 2 007	Penata Muda Tk. I / IIIb	Analisis Laporan Keuangan	Strata 1		P
25)	Diva Regina Evangelista, S.STP 19950105 201609 2 001	Penata Muda TK I/IIIb	Analisis Dokumen Perizinan	Strata 1		P
26)	Arie Pratama, S.STP 19940919 201708 1 003	Penata Muda TK I/IIIb	Penyusun Program Anggaran Dan Pelaporan	Strata 1		L
27)	Nadya Aidayanti Rahmadania, S.Kom 19960203 202012 2 015	Penata Muda/IIIa	Pranata Komputer Pertama	Strata 1		P
28)	Yohanes Krisostomos. AB. SS 19850913 201402 1 001	Penata Muda TK I/IIIb	Fasilitator Promosi	Strata 1		L
29)	Uray Dwi Rahmini Sari. S.S 19830107 201502 2 001	Penata Muda TK I/IIIb	Penerjemah Pertama	Strata 1		P
30)	AB. Iskandar 19740111 200701 1 015	Penata Muda / IIIa	Pengadministrasi Perizinan	SMA		L
31)	Nurmila 19760607 200701 2 020	Penata Muda / IIIa	Pengadministrasi Persuratan	SMA		P
32)	Alhani, S.A.P 19670102 199203 1 006	Penata Tk I / III d	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Strata 1		L
33)	Syamsiar, SE 19830205 200904 2 002	Penata / IIIc	Pengawas Penanaman Modal	Strata 1		P
34)	Isti Citra Yuniartiti, S.Pd 19890526 202204 2 001	Penata Muda / IIIa	Penerjemah Pertama	Strata 1		P
35)	Muhammad Hatta 19751111 200701 1 018	Penata Muda / IIIa	Pengelola Barang Milik Negara	SMA		L
36)	Elibert Yosua Sinambela, S.STP. M.P.A 19930809 201609 1 001	Penata Muda Tingkat I / IIIb	Analisis Dokumen Perizinan	Strata 1		L
37)	Irsanti Kusuma Astari, S.Ak 19861120 200903 2 002	Penata Muda Tingkat I / IIIb	Pengelola Kepegawaian	Strata 1		P
38)	Lasmaria Aritonang, S.Kom, S.E 19871010 201001 2 015	Penata Muda Tingkat I / IIIb	Pemeriksa Penanaman Modal	Strata 1		P
39)	Rija Sunantri, ST 19880322 201402 1 001	Penata Muda Tingkat I / IIIb	Pranata Komputer Pertama	Strata 1		L
40)	Zulkarnain, S.Kom 19830520 201101 1 007	Penata Muda Tingkat I / IIIb	Pranata Komputer Pertama	Strata 1		L
41)	Ririn Narita, S.Psi 19830425 200604 2 013	Penata Tk I / III d	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Muda	Strata 1		P
42)	Shinta Widiarti Ezwar, S.E 19881112 201101 2 007	Penata Tk I / III d	Kepala Sub Bagian Umum Dan Aparatur	Strata 1		P
43)	Surahman, S.Sos, M.Si 19820428 200801 1 008	Penata Tk I / III d	Analisis Dokumen Perizinan	Strata 2		L
44)	Kelpin Kaladri, A.Md.Ak. 20000313 202204 1 001	Pengatur / IIc	Pengelola Keuangan	Diploma 3		L
45)	Muhammad Fadly, A.Md 19910421 201502 1 001	Pengatur Tingkat I / II d	Pranata Komputer Terampil	Diploma 3		L

No	Nama / NIP	Pangkat / Golongan	Jabatan	Pendidikan	Diklat Strukt	Jenis Kel.
46)	Marita 19651223 199008 2 001	Penata / IlIc	Pengelola Keuangan	SMA		P

\*Bagian Umum Aparatur DPMPSTSP Prov. Kalbar Desember 2021

#### - Realisasi Pendapatan

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Retribusi Daerah pasal 68 ayat 2 disebutkan bahwa "OPD penghasil sebagai Pejabat Pemungut Retribusi untuk melaksanakan pemungutan retribusi", hal tersebut menjelaskan bahwa DPMPSTSP tidak lagi menjadi Perangkat Daerah Pemungut Retribusi untuk perizinan yang dikenakan retribusi daerah.

#### - Realisasi Belanja

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat untuk tahun anggaran 2023 mendapatkan alokasi anggaran belanja murni sebesar Rp.12.976.679.820,-. Pada penyempurnaan pergeseran anggaran Tahun 2023 menjadi Rp. 12.789.420.137,- berkurang anggaran sebesar Rp.187.259.683,- kemudian pada perubahan anggaran Tahun 2023 menjadi Rp.12.019.968.846,- berkurang sebesar Rp. 769.451.291, secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel.2 Anggaran dan Realisasi Belanja DPMPSTSP Prov. Kalbar T.A 2023

Kode Rek	Program/ Kegiatan	Anggaran Belanja		Realisasi	%
		Murni	Perubahan		
1	2	3	4	8 (5+6+7)	9
	TOTAL BELANJA	12.976.679.820	12.019.968.846	11.472.645.554	95,45
	BELANJA OPERASI	12.870.246.737	11.828.535.763	11.283.207.254	95,39
	BELANJA MODAL	106.433.083	191.433.083	189.438.300	98,96
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	9.787.819.974	9.319.829.000	8.875.063.835	95,23
1.01	KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	196.402.700	142.002.700	141.106.337	99,37
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24.243.200	14.922.700	14.881.750	99,73
02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12.018.700	6.793.200	6.650.900	97,91
03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	12.018.700	6.568.700	6.490.275	98,81
04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	12.201.800	6.751.800	6.544.400	96,93
05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	12.061.300	6.611.300	6.495.032	98,24

Kode Rek	Program/ Kegiatan	Anggaran Belanja		Realisasi	%
		Murni	Perubahan		
1	2	3	4	8 (5+6+7)	9
06	Koordinasi dan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	48.258.700	39.458.700	39.363.925	99,76
07	Evaluasi Kinerja Perangkat Dae4rah	75.396.300	60.896.300	60.680.055	99,64
1.02	KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERRAH	7.621.575.036	7.484.943.745	7.090.613.930	94,73
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.211.817.136	7.129.985.845	6.755.891.865	94,75
03	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	273.600.000	273.600.000	253.650.000	92,71
05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	76.618.900	45.868.900	45.800.053	99,85
06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	27.802.200	16.452.200	16.355.625	99,41
08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	31.736.800	19.036.800	18.916.387	99,37
1.03	KEGIATAN ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	21.459.900	13.659.900	13.642.622	99,87
06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	21.459.900	13.659.900	13.642.622	99,87
1.05	KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	295.694.800	244.394.800	233.180.099	95,41
02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	84.000.000	84.000.000	76.342.500	90,88
03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	30.230.100	13.630.100	13.222.060	97,01
04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12.000.000	12.000.000	11.336.789	94,47
05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	79.464.700	44.764.700	44.316.983	99,00
09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	70.000.000	70.000.000	69.935.234	99,91
11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20.000.000	20.000.000	18.026.533	90,13
1.06	KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	382.787.135	361.887.136	341.307.593	94,31
01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.914.800	9.902.800	9.163.050	92,53
02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	41.463.900	47.663.900	46.965.127	98,53
03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	32.654.900	36.166.900	34.819.870	96,28

Kode Rek	Program/ Kegiatan	Anggaran Belanja		Realisasi	%
		Murni	Perubahan		
1	2	3	4	8 (5+6+7)	9
04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.700.000	17.700.000	14.394.750	81,33
05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	57.289.835	57.289.835	51.042.393	89,10
06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	24.000.000	12.000.000	9.225.000	76,88
08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	24.000.000	24.000.000	20.092.750	83,72
09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90.900.000	112.900.000	112.131.721	99,32
10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	29.551.800	12.451.800	12.138.028	97,48
11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	45.311.900	31.811.900	31.334.904	98,50
1.07	KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	109.683.083	144.683.083	142.737.050	98,65
05	Pengadaan Mebel	12.485.000	28.174.000	27.947.000	99,19
06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	97.198.083	116.509.083	114.790.050	98,52
1.08	KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	843.546.120	681.586.437	674.843.257	99,01
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000	500.000	0	0,00
02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	216.000.000	28.740.317	28.740.317	100,00
04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	623.546.120	652.346.120	646.102.940	99,04
1.09	KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	316.671.200	246.671.200	237.632.947	96,34
01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	88.827.200	88.827.200	79.939.480	89,99
02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	73.191.000	73.194.000	73.113.467	99,89
06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	74.650.000	74.650.000	74.603.000	99,94
09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	70.000.000	0	0	0
11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000	10.000.000	9.977.000	99,77

Kode Rek	Program/ Kegiatan	Anggaran Belanja		Realisasi	%
		Murni	Perubahan		
1	2	3	4	8 (5+6+7)	9
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	613.539.900	459.589.900	451.916.514	98,33
1.01	KEGIATAN PENETAPAN PEMBERIAN FASILITASI/INSENTIF DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH PROVINSI	437.147.300	330.447.300	329.434.784	99,69
01	Penetapan Kebijakan Daerah Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	384.883.000	290.783.000	290.558.699	99,92
02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	52.264.300	39.664.300	38.876.085	98,01
1.02	KEGIATAN PEMBUATAN PETA POTENSI INVESTASI PROVINSI	176.392.600	129.142.600	122.481.730	94,84
01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	94.092.000	72.042.000	65.421.920	90,81
02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	82.300.600	57.100.600	57.059.810	99,93
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	630.918.600	541.618.600	537.331.388	99,21
1.01	KEGIATAN PENYELENGGARAAN PROMOSI PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH PROVINSI	630.918.600	541.618.600	537.331.388	99,21
01	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	630.918.600	541.618.600	537.331.388	99,21
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	778.591.748	628.831.748	616.273.860	98,00
1.02	KEGIATAN PENANAMAN MODAL YANG MENURUT KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENJADI KEWENANGAN DAERAH PROVINSI	778.591.748	628.831.748	616.273.860	98,00
01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	262.541.348	216.171.348	212.113.678	98,12
02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	215.498.800	188.738.800	186.095.679	98,60

Kode Rek	Program/ Kegiatan	Anggaran Belanja		Realisasi	%
		Murni	Perubahan		
1	2	3	4	8 (5+6+7)	9
03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	114.355.500	65.385.500	62.721.930	95,93
04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	186.196.100	158.536.100	155.342.573	97,99
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	1.073.726.498	1.000.456.498	940.157.709	93,97
1.01	KEGIATAN PENGENDALIAN PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH PROVINSI	1.073.726.498	1.000.456.498	940.157.709	93,97
01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	78.469.898	69.329.898	62.096.731	89,57
02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	663.741.900	626.571.900	594.972.684	94,96
03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	331.514.700	304.554.700	283.088.294	92,95
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	90.083.100	69.643.100	51.902.248	74,53
1.01	KEGIATAN URUSAN PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL YANG TERINTEGRASI PADA TINGKAT DAERAH PROVINSI	92.083.100	69.643.100	51.902.248	74,53
01	Pengolahan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Teintegrasi secara Elektronik	92.083.100	69.643.100	51.902.248	74,53

\*Laporan Realisasi Fisik DPMPSTSP Prov. Kalbar T.A 2023

## BAB II

### PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PERUBAHAN (APBD-P) PERANGKAT DAERAH

#### A. Anggaran Pendapatan

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Retribusi Daerah pasal 68 ayat 2 disebutkan bahwa "OPD penghasil sebagai Pejabat Pemungut Retribusi untuk melaksanakan pemungutan retribusi", hal tersebut menjelaskan bahwa DPMPTSP tidak lagi menjadi Perangkat Daerah Pemungut Retribusi untuk perizinan yang dikenakan retribusi daerah.

#### B. Anggaran Belanja Perubahan Daerah (APBD-P)

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Barat memiliki pagu awal sebesar Rp.12.976.679.820,-. Pada penyempurnaan pergeseran anggaran Tahun 2023 menjadi Rp. 12.789.420.137,- berkurang anggaran sebesar Rp.187.259.683,- kemudian pada perubahan anggaran Tahun 2023 menjadi Rp.12.019.968.846,- berkurang sebesar Rp. 769.451.291,-.

Tabel. 3 Anggaran dan Realisasi Belanja DPMPTSP Prov. Kalbar T.A 2023

Program/ Kegiatan	Anggaran Belanja Perubahan	Realisasi					%
		Realisasi Belanja	Jenis belanja			Total Realisasi Belanja	
			Pegawai	Barang & Jasa	Modal		
2	3	4	5	6	7	8 (5+6+7)	9
<b>TOTAL BELANJA</b>	12.019.968.846	11.472.645.554	6.992.211.865	4.290.995.389	189.438.300	11.472.645.554	95.45
<b>BELANJA OPERASI</b>	11.828.535.763	11.283.207.254	6.992.211.865	4.290.995.389		11.283.207.254	95.39
<b>BELANJA MODAL</b>	191.433.083	189.438.300			189.438.300	189.438.300	98.96

#### 1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Pada program pengembangan iklim penanaman modal memiliki 2 kegiatan dan 4 sub kegiatan, yaitu kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi dengan 2 sub kegiatan yaitu sub kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal dan sub kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal. Kemudian kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi dengan 2 sub kegiatan yaitu sub kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman modal Daerah Provinsi dan Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi.

Tabel 4. Kegiatan dan sub kegiatan pada Program Pengembangan Iklim  
Penanaman Modal

<b>Nama Kegiatan</b>	<b>Sub Kegiatan</b>	<b>Keluaran</b>
(2.18.02.1.01) Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	(2.18.02.1.01.01) Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
	(2.18.02.1.01.02) Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah
(2.18.02.1.02) Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	(2.18.02.1.02.01) Penyusunan Rencana Umum Penanaman modal Daerah Provinsi	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi
	(2.18.02.1.02.02) Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Jumlah Peta Potensi Investasi dan peluang Usaha Provinsi

Berkaitan dengan besaran pagu anggaran yang dikelola pada program pengembangan iklim penanaman modal serta realisasi anggaran berikut persentasenya dapat dilihat sebagaimana tersebut pada Tabel di bawah ini.

Tabel 5. Realisasi Anggaran Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

No	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Pagu Murni	Pagu Perubahan	Realisasi	%
2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	613.539.900	459.589.900	451.916.514	98.33
2.18.02.1.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	437.147.300	330.447.300	329.434.784	99.69
2.18.02.1.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	384.883.000	290.783.000	290.558.699	99.92
2.18.02.1.01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	52.264.300	39.664.300	38.876.085	98.01
2.18.02.1.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	176.392.600	129.142.600	122.481.730	94.84
2.18.02.1.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman modal Daerah Provins	94.092.000	92.042.000	65.421.920	90.81
2.18.02.1.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	82.300.600	57.100.600	57.059.810	99.93

**a. Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**

**- Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal**

Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal dengan pagu awal Rp. 384.883.000,- yang kemudian mengalami perubahan menjadi Rp. 290.783.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 290.558.699,- atau 99.92%. Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menyamakan persepsi terkait Kemudahan Pelayanan Perizinan dan dukungan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan Triwulan IV 2023 antara lain :

- a. Rapat persiapan Rapat Implementasi Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan Di Bidang Penanaman Modal Antara Usaha Besar Dengan Usaha Mikro, Dan Menengah Di Daerah yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 bertempat di Aula DPMPTSP Prov. Kalbar
- b. Rapat Pembahasan perubahan Rancangan Perda Provinsi Kalimantan Barat yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 bertempat di Aula DPMPTSP Prov. Kalbar
- c. Rapat persiapan Sosialisasi Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala DPMPTSP Prov. Kalbar yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 bertempat di Aula DPMPTSP Prov. Kalbar
- d. Rapat Implementasi Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan Di Bidang Penanaman Modal Antara Usaha Besar Dengan Usaha Mikro, Dan Menengah Di Daerah yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2023 bertempat di Hotel Golden Tulip Pontianak.
- e. Perjalanan Dinas dalam rangka pembahasan lebih lanjut rencana kerja penyusunan IPRO (Investment Project Ready To Offer) ke Kementerian Investasi/BKPM di Jakarta pada tanggal 19 Juni – 21 Juni 2023
- f. Rapat Evaluasi Kegiatan Pemberdayaan Usaha Daerah tentang Implementasi Permen Investasi/Kepala BKPM Nomor 1 Tahun 2022 yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 bertempat di Ruang Rapat DPMPTSP Prov. Kalbar
- g. Rapat Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/insentif dan Kemudahan Penanaman Modal yang dilaksanakan hari Senin tanggal 17 Juli 2023 bertempat di Ruang Rapat DPMPTSP Prov. Kalbar
- h. Perjalanan dinas dalam rangka Sinkronisasi Kegiatan Pemberdayaan Usaha Terkait dengan pelaksanaan kemitraan usaha kecil dan menengah dengan perusahaan PMA/PMDN di Kota Singkawang pada tanggal 2 – 4 Agustus 2023.
- i. Perjalanan dinas dalam rangka sinkronisasi terkait penyusunan potensi dan peluang investasi daerah di Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang pada tanggal 3 – 5 Agustus 2023.

- j. Diskusi dan Pembahasan tentang Potensi Investasi dan Peran Pemerintah Daerah Dalam mendukung Promosi Investasi di Kalimantan Barat dengan Bank Indonesia Perwakilan Kalbar yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 bertempat di Aula DPMPTSP Prov. Kalbar.
- k. Perjalanan Dinas dalam rangka pematangan rencana kegiatan Penyusunan IPRO ke Kementerian Investasi/BKPM di Jakarta pada tanggal 25 - 27 September 2023.
- l. Perjalanan Dinas dalam rangka pembahasan penyusunan RUPM dengan Direktorat Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal di Kementerian Investasi/BKPM di Jakarta pada tanggal 25 - 27 September 2023.
- m. Perjalanan Dinas dalam rangka pemetaan potensi dan peluang investasi untuk penyusunan IPRO ke DPMPTK Kota Singkawang pada tanggal 4 – 6 Oktober 2023.
- n. Perjalanan Dinas dalam rangka pemetaan potensi dan peluang investasi untuk penyusunan IPRO ke DPMPTSP Kabupaten Sambas pada tanggal 4 – 6 Oktober 2023.
- o. Perjalanan dinas dalam rangka pembahasan pelaksanaan workshop penyusunan IPRO ke Kementerian Investasi/BKPM di Jakarta pada tanggal 24 – 26 Oktober 2023.
- p. Rapat persiapan Kegiatan Workshop Penyusunan Investment Project Ready to Offer (IPRO) yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 bertempat di Ruang Rapat Bidang PM DPMPTSP Provinsi Kalbar.
- q. Rapat Kegiatan Pemetaan Potensi dan Peluang Investasi di Provinsi Kalbar yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 bertempat di Ruang Rapat DPMPTSP Provinsi Kalbar.
- r. Perjalanan dinas dalam rangka kegiatan penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi di Kota Singkawang pada tanggal 6 – 8 November 2023.
- s. Perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan pada acara serah terima bukti asli (fisik) jaminan reklamasi dan pasca tambang di Jakarta pada tanggal 13 – 15 November 2023.
- t. Bimtek Penyusunan Investment Project Ready to Offer (IPRO) di Provinsi Kalimantan Barat yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 bertempat di Aula DPMPTSP Provinsi Kalimantan Barat.

- u. Perjalanan dinas dalam rangka kegiatan pelaksanaan penyusunan Bimtek IPRO di Provinsi Kalbar pada tanggal 23 November 2023 (Narasumber dari Kementerian Investasi/BKPM) .
  - v. Perjalanan dinas dalam rangka sinkronisasi terkait penyusunan potensi dan peluang investasi di Kota Singkawang pada tanggal 27 – 29 November 2023.
  - w. Perjalanan dinas dalam rangka sinkronisasi kegiatan penetapan kebijakan daerah dalam pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal di Kota Singkawang pada tanggal 14 – 15 Desember 2023.
- **Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal**

Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal dengan pagu awal Rp. 52.264.300,- yang kemudian mengalami perubahan menjadi Rp. 39.664.300,- dengan realisasi sebesar Rp. 38.876.085,- atau 98.01%. Kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan Triwulan IV 2023 antara lain :

- a. Perjalanan Dinas dalam rangka Penyelarasan Rekognisi Lebih Lanjut Terkait Rencana Investasi di DPMPTSP Kabupaten Sanggau pada tanggal 27 Maret – 29 Maret 2023.
- b. Perjalanan dinas dalam rangka Sinkronisasi kegiatan Pemberdayaan Usaha terkait dengan pelaksanaan kemitraan usaha mikro, kecil dan menengah dengan perusahaan PMA/PMDN di Kabupaten Sambas pada tanggal 23 – 25 Agustus 2023.
- c. Perjalanan dinas dalam rangka evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal di DPMPTSP Kabupaten Sanggau pada tanggal 6 – 8 November 2023.

**b. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi**

- **Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi**

Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi dengan pagu awal Rp. 94.092.000,- yang kemudian mengalami perubahan menjadi Rp. 72.042.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 65.421.920,- atau 90.81%. Kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan Triwulan IV 2023 antara lain :

- a. Perjalanan dinas dalam rangka pengumpulan data informasi untuk penyusunan perubahan Peraturan Gubernur Tentang RUPM Prov. Kalbar di DPMPTSP Kab. Sanggau pada tanggal 11 – 13 Oktober 2023.
- b. Perjalanan dinas dalam rangka pengumpulan data informasi untuk penyusunan perubahan Peraturan Gubernur Tentang RUPM Prov. Kalbar di DPMPTSP Kab. Sintang pada tanggal 11 – 13 Oktober 2023.
- c. Perjalanan dinas dalam rangka menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Investasi 2023 di Jakarta pada tanggal 4 – 8 Desember 2023.
- d. Rapat Kegiatan Penyusunan Draft Perubahan Pergub RUPM yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 di Ruang Rapat DPMPTSP Provinsi Kalbar.
- e. Rapat Evaluasi Kegiatan Penyusunan Draft Perubahan Pergub RUPM yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 di Ruang Rapat DPMPTSP Provinsi Kalbar.

- **Sub Kegiatan Penyediaan peta Potensi dan peluang Usaha Provinsi**

Sub Kegiatan Penyediaan peta Potensi dan peluang Usaha Provinsi dengan pagu awal Rp. 82.300.600,- yang kemudian mengalami perubahan menjadi Rp. 57.100.600,- dengan realisasi sebesar Rp. 57.059.810,- atau 99.93%. Kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan Triwulan IV 2023 antara lain:

- a. Perjalanan Dinas dalam rangka pembahasan lebih lanjut dengan Direktorat Pengembangan Potensi Daerah Terkait pemutakhiran data Potensi Investasi Regional (PIR) di Kementerian Investasi/BKPM Jakarta tanggal 19 Juni – 21 Juni 2023.
- b. Rapat pembahasan tentang Potensi dan Peluang Investasi Daerah dengan Dirjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 di Ruang Rapat DPMPTSP Provinsi Kalbar.
- c. Rapat penjelasan investasi swasta dalam RKP 2024 yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 di Ruang Rapat DPMPTSP Provinsi Kalbar
- d. Perjalanan dinas dalam rangka sinkronisasi terkait penyusunan potensi dan peluang investasi daerah di Kabupaten Sambas pada tanggal 23 – 25 Agustus 2023.
- e. Perjalanan dinas dalam rangka sinkronisasi penyediaan peta potensi dan peluang usaha provinsi ke Kementerian Investasi/BKPM di Jakarta pada tanggal 13 -15 November 2023.

- f. Perjalanan dinas dalam rangka menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Investasi 2023 di Jakarta pada tanggal 4 – 7 Desember 2023.

## 2. Program Promosi Penanaman Modal

Pada program promosi penanaman modal memiliki 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, yaitu kegiatan Penyelenggaraan promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi dengan 1 sub kegiatan yaitu sub kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi.

Tabel 6. Kegiatan dan sub kegiatan pada Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

<b>Nama Kegiatan</b>	<b>Sub Kegiatan</b>	<b>Keluaran</b>
(2.18.03.1.01) Penyelenggaraan promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	(2.18.03.1.01.02) Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi

Berkaitan dengan besaran pagu anggaran yang dikelola pada program promosi penanaman modal serta realisasi anggaran berikut persentasenya dapat dilihat sebagaimana tersebut pada Tabel di bawah ini.

Tabel 7. Realisasi Anggaran Program Promosi Penanaman Modal

<b>No</b>	<b>Kegiatan dan Sub Kegiatan</b>	<b>Pagu Murni</b>	<b>Pagu Perubahan</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	630.918.600	541.618.600	537.331.388	99.21
2.18.03.1.01	Penyelenggaraan promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	630.918.600	541.618.600	537.331.388	99.21
2.18.03.1.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	630.918.600	541.618.600	537.331.388	99.21

**a. Kegiatan Penyelenggaraan promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**

**- Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi**

Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi dengan pagu awal Rp. 630.918.600,- yang kemudian mengalami perubahan menjadi Rp. 541.618.600,- dengan realisasi sebesar Rp. 537.331.388,- atau 99.21%. Kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan Triwulan IV 2023 antara lain:

- a. Pembuatan video profil potensi investasi daerah, dengan output 1 video profil potensi investasi Kalimantan Barat;
- b. Pembuatan video profil kantor, dengan output 1 video profil kantor DPMPTSP
- c. Pembuatan video profil potensi investasi daerah, dengan output 1 video profil potensi investasi “Bandar Udara Singkawang”;
- d. Pembuatan buku, dengan output 1 Buku Potensi Investasi Bandar Udara Singkawang;
- e. Pembuatan leaflet, dengan output Leaflet Bandar Udara Singkawang;
- f. Pembuatan aplikasi, dengan output Aplikasi SELARASIN (Sistem Layanan Terpadu Satu Pintu).

**3. Program Pelayanan Penanaman Modal**

Pada program pelayanan penanaman modal memiliki 1 kegiatan dan 4 sub kegiatan, yaitu kegiatan Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan menjadi Kewenangan Daerah Provinsi dengan 4 sub kegiatan yaitu sub kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, sub kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal, sub kegiatan Penyediaan layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan, dan sub kegiatan Koordinasi Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah.

Tabel 8. Kegiatan dan sub kegiatan pada Program Pelayanan Penanaman Modal

<b>Nama Kegiatan</b>	<b>Sub Kegiatan</b>	<b>Keluaran</b>
(2.18.04.1.02) Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	(2.18.04.1.02.01) Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Kewenangan Daerah Provinsi
	(2.18.04.1.02.02) Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan NonPerizinan Penanaman Modal Kewenangan Daerah Provinsi
	(2.18.04.1.02.03) Penyediaan layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Kewenangan Daerah Provinsi
	(2.18.04.1.02.04) Koordinasi Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kewenangan Daerah Provinsi

Berkaitan dengan besaran pagu anggaran yang dikelola pada program promosi penanaman modal serta realisasi anggaran berikut persentasenya dapat dilihat sebagaimana tersebut pada Tabel di bawah ini.

Tabel 9. Realisasi Anggaran Program Pelayanan Penanaman Modal

No	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Pagu Murni	Pagu Perubahan	Realisasi	%
2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	778.591.748	628.831.748	616.273.860	98.00
2.18.04.1.02	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	778.591.748	628.831.748	616.273.860	98.00
2.18.04.1.02.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	262.541.348	216.171.348	212.113.678	98.12
2.18.04.1.02.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	215.498.800	188.738.800	186.095.679	98.60
2.18.04.1.02.03	Penyediaan layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	114.355.500	65.385.500	62.721.930	95.93
2.18.04.1.02.04	Koordinasi Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	186.196.100	158.536.100	155.342.573	97.99

**a. Kegiatan Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**

- **Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik**

Sub Kegiatan Penyediaan pelayanan terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dengan pagu awal Rp. 262.541.348,- yang kemudian mengalami perubahan menjadi Rp. 216.171.348,- dengan realisasi sebesar Rp. 212.113.678,- atau 98.12%. Kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan Triwulan IV 2023 antara lain :

- a. Kegiatan Rapat yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan IV adalah pada tanggal 31 Maret 2023 dengan agenda Pembahasan Perubahan Persetujuan pada Surat Tanda Keterangan Andon (STKA)

dam Pembahasan Mekanisme Penyelenggaraan Perizinan Berusaha UMKU Surat Tanda Keterangan Andon (STKA) dan Surat Tanda Penangkapan Ikan (STPI) ANDON;

- b. Pada tanggal 5 Juni 2023 dengan agenda rapat Pengenalan/Tutorial Internal Aplikasi Mandiri Pelayanan Non Perizinan dan Non OSS yang akan diterapkan oleh DPMPSTSP Provinsi Kalimantan Barat;
- c. Pada tanggal 11 September 2023 dengan agenda Menindaklanjuti Hasil Evaluasi atas Kemudahan Berusaha Tahun 2023 dari BPKP Provinsi Kalimantan Barat dan Percepatan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kelautan dan Perikanan.

- **Sub Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal**

Sub Kegiatan Pemantauan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal dengan pagu awal Rp. 215.498.800,- yang kemudian mengalami perubahan menjadi Rp. 188.738.800,- dengan realisasi sebesar Rp. 186.095.679,- atau 98.60%. Kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan Triwulan IV 2023 antara lain :

- a. Pada tanggal 28 Februari 2023 dengan agenda Membahas Tindaklanjut Laporan SKM Triwulan IV Tahun 2022 berupa Rapat Evaluasi SP dan SOP, Membahas Pelaksanaan SKM Triwulan I Tahun 2023 dan Membahas Kaderisasi dalam pelaksanaan penyusunan Laporan SKM Tahun 2023;
- b. Pada tanggal 10 April 2023 dengan agenda Membahas Progres Tindak Lanjut Penyusunan SOP dan SP, Evaluasi SKM TW I dan Rencana Pelaksanaan SKM untuk Triwulan II ;
- c. Pada tanggal 12 Juli 2023 dengan agenda Hasil Laporan Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Triwulan II Tahun 2023;
- d. Pada tanggal 11 Oktober 2023 dengan agenda Hasil Laporan Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Triwulan III Tahun 2023;
- e. Pada tanggal 12 Desember 2023 telah dilaksanakan rapat dengan agenda Hasil Laporan Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Triwulan IV Tahun 2023.

- **Sub Kegiatan Penyediaan layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan**

Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan dengan pagu awal Rp. 114.498.800,- yang kemudian mengalami perubahan menjadi Rp. 65.385.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 62.721.930,- atau 95.93 %. Kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan Triwulan IV 2023 antara lain :

- a. Pada tanggal 14 Agustus 2023 dengan agenda Kunjungan Kerja Pemerintah Kota Singkawang dalam rangka Penerbitan Perizinan aktivitas Pertambangan dikaitkan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Singkawang, serta pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap izin pertambangan yang ada di wilayah Kota Singkawang;
- b. Pada tanggal 23 Oktober 2023 telah dilaksanakan rapat dengan agenda Kegiatan Pengawasan yang telah dilakukan oleh Tim Saber Pungli pada tanggal 19 Oktober 2023;
- c. Pada tanggal 21 Desember 2023 telah dilaksanakan rapat dengan agenda Evaluasi Mekanisme Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat.

- **Sub Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah**

Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah dengan pagu awal Rp. 186.196.100,- yang kemudian mengalami perubahan menjadi Rp. 158.536.100,- dengan realisasi sebesar Rp. 155.342.573,- atau 97.99 %. Kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan Triwulan IV 2023 antara lain :

- a. Pada tanggal 7 Februari 2023 Agenda Sinkronisasi Regulasi adanya perubahan parameter persetujuan lingkungan sektor Perkebunan dan SDM di OSS-RBA;
- b. Pada tanggal 26 Mei 2023 dengan agenda membahas persiapan akhir pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Mekanisme Perizinan Berusaha Sektor Pertambangan Mineral Non Logam dan Batuan Melalui OSS-RBA;

- c. Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kewenangan Daerah Provinsi pada Triwulan IV sudah terealisasi dengan terlaksananya kegiatan Sosialisasi dengan Tema “**Mekanisme Sistem Perizinan Berusaha Sektor Pertambangan Mineral Non Logam dan Batuan Melalui Sistem OSS-RBA**”, pada tanggal 30 Mei 2023;
- d. Pada tanggal 27 Oktober 2023 telah dilaksanakan rapat dengan agenda evaluasi dan konsolidasi penyelenggaraan perizinan berusaha melalui Sistem OSS RBA;
- e. Pada tanggal 11 Desember 2023 telah dilaksanakan rapat dengan agenda Membahas Rekomendasi PBPH PT. Global Hijau Nusantara dan Membahas Persetujuan DPLH (Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup) CV. Citra Mandiri Kalbar;
- f. Pada tanggal 15 Desember 2023 telah dilaksanakan rapat dengan agenda menindaklanjuti Rapat Sinkronisasi Kebijakan Pemberian Rekomendasi untuk Perizinan Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang telah dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2023 di Ruang Rapat DPMPTSP Gedung Pelayanan Terpadu Lt. 2.

#### 4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Pada program pengendalian pelaksanaan penanaman modal memiliki 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan, yaitu kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi dengan 3 sub kegiatan yaitu sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal, sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal, dan sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal.

Tabel 10. Kegiatan dan sub kegiatan pada Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

<b>Nama Kegiatan</b>	<b>Sub Kegiatan</b>	<b>Keluaran</b>
(2.18.05.1.01) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	(2.18.05.1.01.01) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
	(2.18.05.1.01.02) Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
	(2.18.05.1.01.03) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan

Berkaitan dengan besaran pagu anggaran yang dikelola pada program pengendalian pelaksanaan penanaman modal serta realisasi anggaran berikut persentasenya dapat dilihat sebagaimana tersebut pada Tabel di bawah ini.

Tabel 11. Realisasi Anggaran Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

No	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Pagu Murni	Pagu Perubahan	Realisasi	%
2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1.073.726.498	1.000.456.498	940.157.709	93.97
2.18.05.1.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	1.073.726.498	1.000.456.498	940.157.709	93.97
2.18.05.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	78.469.898	69.329.898	62.096.731	89.57
2.18.05.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	663.741.900	626.571.900	594.972.684	94.96
2.18.05.1.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	331.514.700	304.554.700	283.088.294	92.95

**a. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**

**- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal**

Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal dengan pagu awal Rp. 78.469.898,- yang kemudian mengalami perubahan menjadi Rp. 69.329.898,- dengan realisasi sebesar Rp. 62.096.731,- atau 89.57%. Kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan Triwulan IV 2023 antara lain:

- a. Menyurati perusahaan penanaman modal PMDN dan PMA mengenai pemberitahuan kewajiban penyampaian LKPM Triwulan IV Tahun 2022
- b. Menyurati perusahaan penanaman modal PMDN dan PMA mengenai pemberitahuan kewajiban penyampaian LKPM Triwulan I Tahun 2023
- c. Menyurati perusahaan penanaman modal PMDN dan PMA mengenai pemberitahuan kewajiban penyampaian LKPM Triwulan II Tahun 2023.
- d. Menyurati perusahaan penanaman modal PMDN dan PMA mengenai pemberitahuan kewajiban penyampaian LKPM Triwulan III Tahun 2023.
- e. Menyurati perusahaan penanaman modal PMDN dan PMA mengenai pemberitahuan kewajiban penyampaian LKPM Triwulan IV Tahun 2023.

- f. Terlaksananya rapat persiapan Sosialisasi Pelaksanaan Pengendalian Penanaman Modal dalam rangka Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- g. Melaksanakan Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Pengendalian Penanaman Modal dalam rangka Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 bertempat di Ruang Rapat DPMPTSP Provinsi Kalimantan Barat.
- h. Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Pengendalian Penanaman Modal Dalam Rangka Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko diikuti sebanyak 50 orang yang terdiri dari DPMPTSP Provinsi, Pemegang Hak Akses Pengawasan pada DPMPTSP Kabupaten/Kota, dan Pemegang Hak Akses Pengawasan pada OPD Teknis Provinsi Kalimantan Barat.
- i. Terlaksananya kegiatan Inspeksi Lapangan dan Pemantauan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagai berikut
  - Terlaksananya kegiatan dalam rangka Pemantauan/Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Secara Terintegrasi ke PT. Energi Unggul Persada di Kabupaten Mempawah pada tanggal 14 - 15 Maret 2023
  - Terlaksananya kegiatan Inspeksi Lapangan dan Pemantauan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada CV. Mitra Sinar Bersama dengan bidang usaha penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum di Kota Pontianak pada tanggal 6 Juli 2023
  - Terlaksananya kegiatan Inspeksi Lapangan dan Pemantauan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada PT. Joseph Tresna Karya dengan bidang usaha Industri Minyak dan Lemak Nabati di Kota Pontianak pada tanggal 6 Juli 2023
  - Terlaksananya kegiatan Inspeksi Lapangan dan Pemantauan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada PT. Pelayaran Armada Samudera Ashoka dengan bidang usaha Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri untuk Barang di Kota Pontianak pada tanggal 7 Juli 2023
  - Terlaksananya kegiatan Inspeksi Lapangan dan Pemantauan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada PT. Sungai Budi dengan bidang usaha Angkutan Bermotor untuk Barang Umum di Kota Pontianak pada tanggal 7 Juli 2023
  - Terlaksananya kegiatan Inspeksi Lapangan dan Pemantauan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada CV. Sumber Berkat Usaha

- dengan bidang usaha Penggalian Pasir di Kabupaten Sintang pada tanggal 20 – 22 Juli 2023
- Terlaksananya kegiatan Inspeksi Lapangan dan Pemantauan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada PT. Anugrah Bunda Jaya dengan bidang usaha Aktivitas Rumah Sakit Swasta di Kabupaten Sintang pada tanggal 20 – 22 Juli 2023
  - Terlaksananya kegiatan Inspeksi Lapangan dan Pemantauan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada PT. Wisma Nusantara dengan bidang usaha Penyediaan Minuman di Kota Pontianak pada tanggal 5 Desember 2023
  - Terlaksananya kegiatan Inspeksi Lapangan dan Pemantauan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada PT. Sentosa Mitra Kalindo dengan bidang usaha Real Estate yang Dimiliki Sendiri Atau Disewakan di Kota Pontianak pada tanggal 5 Desember 2023
  - Terlaksananya kegiatan Inspeksi Lapangan dan Pemantauan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada PT. Nada Gembira Bangsa dengan bidang usaha BAR di Kota Pontianak pada tanggal 5 Desember 2023
  - Terlaksananya kegiatan Inspeksi Lapangan dan Pemantauan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada PT. Bintang Jaya Proteina Feedmill dengan bidang usaha Industri Konsentrat Makanan Hewan di Kota Singkawang pada tanggal 14 - 16 Desember 2023
- j. Pelaksanaan Pendampingan dalam pengisian LKPM bagi PMA/PMDN dan UMKM.
- k. Menghadiri Rapat Koordinasi Pencapaian Target Realisasi Investasi Tahun Anggaran 2023 pada tanggal 22 – 24 Agustus 2023 di Jakarta.
- l. Menghadiri Rapat Pembahasan Evaluasi Implementasi Sub Sistem Pengawasan OSS Berbasis Risiko di Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 23 Nopember – 25 Nopember 2023 di Kementerian Investasi/BKPM Jakarta.
- m. Menghadiri Focus Group Discussion Rancangan Prioritas Pembangunan dan Pendanaan Nasional Di Wilayah Kalimantan Barat pada tanggal 29 Nopember – 1 Desember 2023 di Jakarta.

- **Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal**

Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal dengan pagu awal Rp. 663.741.900,- yang kemudian mengalami perubahan menjadi Rp. 628.571.900,- dengan realisasi sebesar Rp. 594.972.684,- atau 94.96%. Kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan Triwulan IV 2023 antara lain:

- a. Terlaksananya kegiatan pendukung Dana Alokasi Khusus Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal seperti pembayaran honorarium tim penyelesaian permasalahan, Bahan untuk Kegiatan Kantor ATK, kertas – cover, bahan cetak, bahan Komputer, honorarium narasumber moderator.
- b. Ke Kementerian Investasi/BKPM RI di Jakarta dalam rangka Fasilitas dan arahan atas pencabutan Perizinan Berusaha PT. SAWIT REZEKI ABADI di Kabupaten Melawi pada tanggal 11 – 13 Desember 2023
- c. Kegiatan Bimbingan Teknis/Sosialisasi
  - Melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko **Angkatan I** pada sektor Pertambangan pada tanggal 16 Maret 2023 bertempat di ruang Boronia Room Lantai 2 Orchardz Hotel A. yani Pontianak dengan jumlah peserta sebanyak 42 Orang.
  - Melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko **Angkatan II** pada sektor Perdagangan pada tanggal 16 Mei 2023 bertempat di ruang Boronia Room Lantai 2 Orchardz Hotel A. yani Jl. Perdana Pontianak dengan jumlah peserta sebanyak 42 Orang.
  - Melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko **Angkatan III** pada sektor Perikanan pada tanggal 17 Mei 2023 bertempat di ruang Boronia Room Lantai 2 Orchardz Hotel A. Yani Jl. Perdana Pontianak dengan jumlah peserta sebanyak 42 Orang.
  - Melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko **Angkatan IV** pada sektor Pariwisata pada tanggal 26 Juni 2023 bertempat di ruang Terasky Dance Floor Lantai 8 Transera Hotel Pontianak dengan jumlah peserta sebanyak 42 Orang.

- Melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko **Angkatan V** pada sektor Perhubungan pada tanggal 27 Juni 2023 bertempat di ruang Terasky Dance Floor Lantai 8 Transera Hotel Pontianak dengan jumlah peserta sebanyak 42 Orang.
  - Melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bagi Pelaku Usaha PMDN/PMA **Angkatan VI** pada tanggal 30 Agustus 2023 bertempat di ruang Boronia Room Lantai 2 Orchardz Hotel A. yani Jl. Perdana Pontianak dengan jumlah peserta sebanyak 42 Orang.
  - Melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bagi Pelaku Usaha PMDN/PMA **Angkatan VII** pada tanggal 31 Agustus 2023 bertempat di ruang Boronia Room Lantai 2 Orchardz Hotel A. yani Jl. Perdana Pontianak dengan jumlah peserta sebanyak 42 Orang.
  - Melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bagi Pelaku Usaha PMDN/PMA **Angkatan VIII** pada tanggal 25 Oktober 2023 bertempat di ruang Raflesia 2 Ballroom Lantai 9 Orchardz Hotel Gajah Mada Jl. Gajah Mada No. 89 Pontianak dengan jumlah peserta sebanyak 42 Orang.
  - Melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bagi Pelaku Usaha PMDN/PMA **Angkatan IX** pada tanggal 26 Oktober 2023 bertempat di ruang Raflesia 2 Ballroom Lantai 9 Orchardz Hotel Gajah Mada Jl. Gajah Mada No. 89 Pontianak dengan jumlah peserta sebanyak 42 Orang.
  - Melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bagi Pelaku Usaha PMDN/PMA **Angkatan X** pada tanggal 30 Nopember 2023 bertempat di Hotel Maestro Jl. Sultan Abdurahman Pontianak dengan jumlah peserta sebanyak 42 Orang.
- d. Kegiatan Penyelesaian Permasalahan Penanaman Modal
- Identifikasi penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh PT. MULTI PRIMA ENTAKAI di Kabupaten Sanggau pada tanggal 29 -31 Maret 2023.

- Terlaksananya kegiatan peninjauan langsung ke lokasi proyek dalam rangka identifikasi penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya pada PT. PALM AGRO MAKMUR di Kabupaten Landak tanggal 24 – 26 Mei 2023.
- Terlaksananya kegiatan peninjauan langsung ke lokasi proyek dalam rangka identifikasi penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya pada CV. PERSADA ENTERTAINMENT di Kabupaten Melawi pada tanggal 6 – 8 September 2023.
- Terlaksananya kegiatan peninjauan langsung ke lokasi proyek dalam rangka identifikasi penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya pada PT. AGRO SUKSES LESTARI di Kabupaten Sintang pada tanggal 11 - 13 September 2023.
- Terlaksananya kegiatan peninjauan langsung ke lokasi proyek dalam rangka identifikasi penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya pada PT. SEMESTA ALAM MAKMUR ESA di Kabupaten Bengkayang pada tanggal 13 - 15 September 2023.
- Terlaksananya kegiatan peninjauan langsung ke lokasi proyek dalam rangka identifikasi penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya pada PT. AGRO ANDALAN di Kabupaten Sekadau tanggal 19 - 21 September 2023.
- Terlaksananya kegiatan peninjauan langsung ke lokasi proyek dalam rangka identifikasi penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya pada PT. KAWEDAR WOOD INDUSTRIES di Kabupaten kapuas Hulu tanggal 25 - 27 September 2023.
- Terlaksananya kegiatan peninjauan langsung ke lokasi proyek dalam rangka identifikasi penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya pada PT. PERTIWI LENGGANA AGROMAS di Kabupaten Ketapang tanggal 4 – 6 Oktober 2023.

- Terlaksananya kegiatan peninjauan langsung ke lokasi proyek dalam rangka identifikasi penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya pada PT. KENCANA ALAM PERMAI di Kabupaten Sintang tanggal 11 - 13 Oktober 2023.
- Terlaksananya kegiatan peninjauan langsung ke lokasi proyek dalam rangka identifikasi penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya pada PT. PERSADA PRATAMA CEMERLANG di Kabupaten Sanggau tanggal 18 – 20 Oktober 2023.
- Terlaksananya kegiatan peninjauan langsung ke lokasi proyek dalam rangka identifikasi penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya pada PT. AGRO ANUGERAH LESTARI di Kabupaten Sekadau tanggal 18 – 20 Oktober 2023.
- Terlaksananya kegiatan peninjauan langsung ke lokasi proyek dalam rangka identifikasi penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya pada PT. USAHA AGRO INDONESIA di Kabupaten Ketapang tanggal 6 – 8 Nopember 2023.
- Terlaksananya kegiatan peninjauan langsung ke lokasi proyek dalam rangka identifikasi penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya pada PT. PERSADA SAWIT PLANTATION di Kabupaten Sintang tanggal 16 – 18 Nopember 2023.
- Terlaksananya kegiatan peninjauan langsung ke lokasi proyek dalam rangka identifikasi penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya pada PT. PUTRA MAKMUR LESTARI di Kabupaten Bengkayang tanggal 27 – 29 Nopember 2023.
- Terlaksananya kegiatan peninjauan langsung ke lokasi proyek dalam rangka identifikasi penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya pada PT. ARTU PLANTATION di Kabupaten Ketapang tanggal 7 – 9 Desember 2023.

- **Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal**

Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal dengan pagu awal Rp. 331.514.700,- yang kemudian mengalami perubahan menjadi Rp. 304.554.700,- dengan realisasi sebesar Rp. 283.088.294,- atau 92.85%. Kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan Triwulan IV 2023 antara lain:

- a. Terlaksananya kegiatan pendukung Dana Alokasi Khusus Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal seperti pembayaran honorarium tim pengawasan pelaksanaan penanaman modal, Bahan untuk Kegiatan Kantor ATK, kertas – cover, bahan cetak, bahan Komputer.
- b. Terlaksananya rapat Analisa dan verifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku usaha sebagai berikut :
  - Tanggal 28 april 2023 bertempat di DPMPTSP Provinsi Kalimantan Barat.
  - Tanggal 8 Mei 2023 bertempat di DPMPTSP Provinsi Kalimantan Barat.
  - Tanggal 5 Juni 2023 bertempat di DPMPTSP Provinsi Kalimantan Barat.
  - Tanggal 16 agustus 2023 bertempat di DPMPTSP Provinsi Kalimantan Barat.
- c. Terlaksananya rapat Rapat Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Pelaku Usaha sebagai berikut :
  - Tanggal 15 Mei 2023 bertempat di DPMPTSP Provinsi Kalimantan Barat
  - Tanggal 12 Juni 2023 bertempat di DPMPTSP Provinsi Kalimantan Barat
  - Tanggal 5 September 2023 bertempat di DPMPTSP Provinsi Kalimantan Barat
- d. Terlaksananya kegiatan Inspeksi Lapangan dan Pengawasan terhadap pelaku usaha sebagai berikut :
  - Terlaksananya kegiatan Inspeksi Lapangan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal PT. Permata Hijau Lestari di Kabupaten Sanggau pada tanggal 7 -9 Maret 2023.
  - Terlaksananya kegiatan Inspeksi Lapangan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal PT. Cahaya Unggul Prima di Kabupaten Sintang pada tanggal 8 - 10 Maret 2023.

- Terlaksananya kegiatan Inspeksi Lapangan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal PT. Indocement Tunggal Perkasa di Kabupaten Mempawah pada tanggal 20 - 21 Maret 2023.
- Terlaksananya kegiatan Inspeksi Lapangan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal PT. Global Indonesia Asia Sejahtera di Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 20 - 21 Maret 2023.
- Terlaksananya kegiatan Inspeksi Lapangan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal PT. Sumatera Makmur Lestari di Kabupaten Sekadau pada tanggal 28 - 30 Maret 2023.
- Terlaksananya kegiatan Inspeksi Lapangan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal PT. Sumberdaya Sewatama di Kabupaten Ketapang pada tanggal 4 – 6 April 2023.
- Terlaksananya kegiatan Inspeksi Lapangan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal PT. Hutan Kencana Damai di Kabupaten Ketapang pada tanggal 4 - 6 April 2023.
- Terlaksananya kegiatan Inspeksi Lapangan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal PT. Kreatif Sukses Usaha di Kota Singkawang pada tanggal 11 - 13 April 2023.
- Terlaksananya kegiatan Inspeksi Lapangan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal CV. Heksa Sumber Usaha di Kabupaten Sambas pada tanggal 11 - 13 April 2023.
- Terlaksananya kegiatan Inspeksi Lapangan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal PT. Welindo Erabadi Lojaya di Kabupaten Sekadau pada tanggal 8 – 10 Mei 2023.
- Terlaksananya kegiatan Inspeksi Lapangan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal PT. Bumi Sawit Utama di Kabupaten Melawi pada tanggal 9 – 11 Mei 2023.
- Terlaksananya kegiatan Inspeksi Lapangan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal PT. Gunung Rijuan Sejahtera di Kabupaten Landak pada tanggal 10 – 12 Mei 2023.
- Terlaksananya kegiatan Inspeksi Lapangan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal PT. Indah Subur Sawit di Kabupaten Landak pada tanggal 10 – 12 Mei 2023.
- Terlaksananya kegiatan Inspeksi Lapangan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal PT. Pisang Jaya Mandiri di Kabupaten Hulu pada tanggal 23 Mei 2023.

- Terlaksananya kegiatan Inspeksi Lapangan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal PT. Lucky Indo Aquatic di Kabupaten Kapuas Hulu pada tanggal 23 Mei 2023.
- Terlaksananya kegiatan Inspeksi Lapangan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal PT. Sarana Esa Citra di Kabupaten Sambas pada tanggal 22 – 24 Mei 2023.
- Terlaksananya kegiatan Inspeksi Lapangan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal PT. Wawasan Kebun Nusantara di Kabupaten Bengkayang pada tanggal 23 – 25 Mei 2023.
- Terlaksananya kegiatan Inspeksi Lapangan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal PT. Ledo Lestari di Kabupaten Bengkayang pada tanggal 23 – 25 Mei 2023.
- Terlaksananya kegiatan Inspeksi Lapangan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal PT. Anugrah Argon di Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 30 – 31 Mei 2023
- Terlaksananya kegiatan Inspeksi Lapangan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal PT. Mitra Andalan Sejahtera di Kabupaten Mempawah pada tanggal 30 – 31 Mei 2023.
- Terlaksananya kegiatan Inspeksi Lapangan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal CV. Sanika Sejahtera Di Kabupaten Kayong Utara pada tanggal 29 – 31 Mei 2023.
- Terlaksananya kegiatan Inspeksi Lapangan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal PT. Kalimantan Agro Pusaka Di Kabupaten Kayong Utara pada tanggal 30 Mei – 1 Juni 2023.
- Terlaksananya kegiatan Inspeksi Lapangan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal PT. Agro Lestari Mandiri Di Kabupaten Ketapang pada tanggal 30 Mei – 1 Juni 2023.
- Terlaksananya kegiatan Inspeksi Lapangan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal PT. Sumber Waras Di Kota Pontianak pada tanggal 5 – 8 Juni 2023.
- Terlaksananya kegiatan Inspeksi Lapangan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal CV. Jaya Kota di Kota Pontianak pada tanggal 5 – 8 Juni 2023.
- Terlaksananya kegiatan Inspeksi Lapangan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal CV. Daya Kita Di Kabupaten Sintang pada tanggal 13 - 15 Juni 2023.

- Terlaksananya kegiatan Inspeksi Lapangan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal PT. Mitra Austral Sejahtera Di Kabupaten Sanggau pada tanggal 13 – 15 Juni 2023.
- Terlaksananya kegiatan Inspeksi Lapangan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal PT. Kirana Putera Karya Di Kabupaten Sintang pada tanggal 14 – 16 Juni 2023.
- Terlaksananya kegiatan Inspeksi Lapangan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal PT. Dayang Resort Mandiri di Kota Singkawang pada tanggal 11 – 13 Juli 2023.
- Terlaksananya kegiatan Inspeksi Lapangan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal PT. Fajar Saudara Kusuma di Kabupaten Sambas pada tanggal 10 – 12 Juli 2023.
- Terlaksananya kegiatan Inspeksi Lapangan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal PT. Sangnaga Khatulistiwa Yasa di Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 10 – 12 Mei 2023.
- Terlaksananya kegiatan Inspeksi Lapangan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal PT. Bintang Pratama Mix di Kabupaten Kubu Rayapada tanggal 17 – 18 Juli 2023.
- Terlaksananya kegiatan Inspeksi Lapangan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal PT. Multi Duta Putra di Kabupaten Sekadau pada tanggal 20 – 22 Juli 2023.
- Terlaksananya kegiatan Inspeksi Lapangan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal PT. Mitra Intisejati Plantation di Kabupaten Bengkayang pada tanggal 25 -27 Juli 2023.
- Terlaksananya kegiatan Inspeksi Lapangan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal pada PT. Smart Cakrawala Aviation dengan bidang usaha Reparasi Pesawat Terbang di Kota Singkawang pada tanggal 7 Juli 2023
- Terlaksananya kegiatan Inspeksi Lapangan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal CV. Indah Pangan Lestari di Kabupaten Melawi pada tanggal 2 - 4 Agustus 2023.
- Terlaksananya kegiatan Inspeksi Lapangan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal CV. Multi Perkasa Sejahtera di Kabupaten Landak pada tanggal 10 – 12 Agustus 2023.
- Terlaksananya kegiatan Inspeksi Lapangan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal PT. Indonesia Chemical Alumina di Kabupaten Sanggau pada tanggal 6 – 8 September 2023.

- Terlaksananya kegiatan Inspeksi Lapangan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal PT. Samboja Inti Perkasa di Kabupaten Melawi pada tanggal 6 – 8 September 2023
- Terlaksananya kegiatan Inspeksi Lapangan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal CV. Cundi Perkasa di Kabupaten Sambas pada tanggal 11 – 13 September 2023.
- Terlaksananya kegiatan Inspeksi Lapangan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal PT. Sumatera Unggul Makmur Di Kabupaten Sambas pada tanggal 13 – 15 September 2023.
- Terlaksananya kegiatan Inspeksi Lapangan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal PT. Agro Kapuas Jaya Di Kabupaten Kapuas Hulu pada tanggal 25 – 27 September 2023.
- Terlaksananya kegiatan Inspeksi Lapangan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal PT. Mitra Saudara Lestari Di Kabupaten Ketapang pada tanggal 4 – 6 Oktober 2023.
- Terlaksananya kegiatan Inspeksi Lapangan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal PT. Rezeki Kencana Prima Di Kabupaten Landak pada tanggal 9 – 11 Oktober 2023.
- Terlaksananya kegiatan Inspeksi Lapangan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal PT. Kapuas Rimba Sejahtera Di Kabupaten Landak pada tanggal 9 – 11 Oktober 2023.
- Terlaksananya kegiatan Inspeksi Lapangan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal PT. Sintang Agro Mandiri Di Kabupaten Landak pada tanggal 11 - 13 Oktober 2023.
- Terlaksananya kegiatan Inspeksi Lapangan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal PT. Kencana Graha Permai Di Kabupaten Ketapang pada tanggal 6 – 8 Nopember 2023.
- Terlaksananya kegiatan Inspeksi Lapangan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal PT. Cemindo Bangun Persada Di Kabupaten Mempawah pada tanggal 5 – 6 Desember 2023.

#### 5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Pada program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal memiliki 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, yaitu kegiatan Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah provinsi dengan 1 sub kegiatan yaitu sub kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

Tabel 12. Kegiatan dan sub kegiatan pada Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

<b>Nama Kegiatan</b>	<b>Sub Kegiatan</b>	<b>Keluaran</b>
(2.18.06.1.01) Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	(2.18.06.1.01.01) Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji, dan Dimanfaatkan

Berkaitan dengan besaran pagu anggaran yang dikelola pada program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal serta realisasi anggaran berikut persentasenya dapat dilihat sebagaimana tersebut pada Tabel di bawah ini.

Tabel 13. Realisasi Anggaran Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

<b>No</b>	<b>Kegiatan dan Sub Kegiatan</b>	<b>Pagu Murni</b>	<b>Pagu Perubahan</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
2.18.06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	92.083.100	69.643.100	51.902.248	74.53
2.18.06.1.01	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	92.083.100	69.643.100	51.902.248	74.53
2.18.06.1.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	92.083.100	69.643.100	51.902.248	74.53

- a. **Kegiatan Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi**
- **Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik**

Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dengan pagu awal Rp. 92.083.100,- yang kemudian mengalami perubahan menjadi Rp. 69.643.100,- dengan realisasi sebesar Rp. 51.902.248,- atau 74.53%. Kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan Triwulan IV 2023 antara lain :

- a. Terlaksananya rapat Rekonsiliasi Data Realisasi PMDN/PMA, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dan LKPM yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 bertempat di Ruang Rapat DPMPTSP Prov. Kalimantan Barat dengan jumlah peserta sebanyak 35 orang berasal dari Pejabat di Lingkungan DPMPTSP Kabupaten/Kota dan pengelola data pengendalian pelaksanaan penanaman modal.
- b. Terlaksananya rapat Rekonsiliasi Data Realisasi PMDN/PMA, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dan LKPM yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2023 bertempat di Ruang Rapat DPMPTSP Prov. Kalimantan Barat dengan jumlah peserta sebanyak 35 orang berasal dari Pejabat di Lingkungan DPMPTSP Kabupaten/Kota dan pengelola data pengendalian pelaksanaan penanaman modal.
- c. Penyusunan buku realisasi investasi.

## BAB III

### HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH

#### 3.1 Pelaksanaan Urusan

Tabel 14. Pelaksanaan Urusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Kalimantan Barat

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN TERPADU SATU PINTU PROV.KALBAR	Penguatan kebijakan, perencanaan, promosi, dan pemantauan pembinaan pelaksanaan penanaman modal serta sistem informasi	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>					
	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi			1 Dokumen	1				
	1. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal			1 Dokumen	1				
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>								
	Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi			1 Kebijakan	1				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				1. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di bidang Penanaman modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	1 Dokumen	1			
				2. Evaluasi Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman modal	3 Kegiatan Usaha	3			
				Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	1 Dokumen	1			
				1. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi Penanaman Modal	1 Dokumen	1	Dokumen Rencana Umum Penanaman modal masih dalam bentuk Draft dikarenakan masih menunggu Perpres terbaru terkait dokumen Rencana Umum Penanaman Modal yang seharusnya berbentuk Pergub	Akan melakukan koordinasi ke BKPM terkait Rencana Umum Penanaman Modal	
				2. Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha provinsi	1 Dokumen	1			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENANAMAN MODAL</b>					
				Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	100%	233%			
				1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan PM	10 Kegiatan Usaha	11			
				2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	120 Pelaku Usaha	420			
				3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	20 Pelaku Usaha	48			
				<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>					
				Kegiatan Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	100%	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				1 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	4 Dokumen	4			
			Peningkatan standar pelayanan perizinan dan nonperizinan yang memenuhi kualitas pelayanan yang cepat, efektif, efisien, transparan	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>					
				Kegiatan Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	1350 Izin dan Nonizin	1910			
				1. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	100 Pelaku Usaha	1910			
				2. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	180 Kegiatan Usaha	243			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			dan akuntabel	3. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	30 Orang	87			
				4. Koordinasi Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	10 Kegiatan Usaha	10			

### 3.2 Kebijakan Strategis yang Dilaksanakan

Tabel 15. Kebijakan Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat.

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
1.	Penguatan kebijakan, perencanaan, promosi, dan pemantauan pembinaan pelaksanaan penanaman modal serta sistem informasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 41 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat</li> <li>- Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja</li> <li>- Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Tata Cara Promosi Penanaman Modal</li> <li>- Peraturan Kepala BKPM Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Fasilitasi Penanaman Modal</li> <li>- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009</li> <li>- Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengolaan Pengaduan Pelayanan Publik</li> </ul>	<p>Masalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan pengawasan secara terintegrasi dilaksanakan melalui sistem OSS, alamat yang tertera pada aplikasi terdapat yang masih belum lengkap sehingga ketika sedang melakukan pengawasan alamat yang tertera tidak sesuai</li> <li>- Ada beberapa kegiatan yang tidak sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan pada aplikasi</li> <li>- Kurangnya SDM penanaman modal di daerah</li> <li>- Target kinerja belum tercapai karena adanya rasionalisasi anggaran sehingga anggaran jenis perbelanjaan tidak memenuhi standar untuk operasional maka terjadi ketidakproporsionalan kegiatan</li> <li>- Dokumen Rencana Umum Penanaman modal masih dalam bentuk Draft dikarenakan masih menunggu Perpres terbaru terkait dokumen Rencana Umum Penanaman Modal yang seharusnya berbentuk Pergub</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan pelayanan Publik.</li> <li>- Keputusan Kepala DPMPTSP Prov.Kalimantan Barat Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pengaduan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov.Kalimantan Barat</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, BKPM-RI, DPMPTSP Provinsi maupun DPMPTSP Kabupaten/Kota tidak lagi menerbitkan Izin Prinsip/Pendaftaran Penanaman Modal karena telah terintegrasi kedalam Nomor Induk Berusaha (NIB) pada aplikasi Online Single Submission (OSS).</li> </ul>	<p>Solusi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memaksimalkan kegiatan untuk pencapaian target yang telah ditetapkan</li> <li>- Memaksimalkan anggaran perbelanjaan yang proporsional dan perlunya dukungan dana yang memadai</li> <li>- Perlu penambahan SDM sesuai dengan analisa jabatan yang ada di Urusan Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal</li> <li>- Kegiatan yang sudah direncanakan oleh Urusan Promosi baik itu berupa pembuatan video profil investasi dan pembuatan buku potensi investasi hgendaknya dapat tetap menjadi usulan prioritas pada tahun berikutnya</li> <li>- Akan berkoordinasi dengan BKPM dan pelaku usaha yang telah ditetapkan oleh sistem</li> </ul>
2.	<p>Peningkatan standar pelayanan perizinan dan non perizinan yang memenuhi kualitas pelayanan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel</p>		<p>Masalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah SDM / FO masih belum mencukupi untuk ditugaskan khusus untuk menangani perizinan</li> <li>- Kompetensi SDM penyelenggara perizinan OSS berbasis risiko masih belum memadai</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih belum optimalnya pemahaman penyelenggara perizinan baik DPMPSTSP maupun perangkat daerah teknis terkait penyelenggaraan perizinan berbasis risiko terutama untuk KBLI berisikan, regulasi yang rancu, dan persyaratan dasar</li> <li>- Terdapat perbedaan regulasi masing-masing kementerian terkait perizinan OSS RBA sehingga aplikasi tersebut masih kurang dalam mengubungkan ke sistem K/L (persyaratan dasar)</li> <li>- Aplikasi OSS RBA yang masih sering terjadi error yang menyebabkan terhambatnya proses penerbitan perizinan</li> <li>- Terkait penanganan pengaduan yaitu ketika akan memfasilitasi kedua pihak (pelapor dan terlapor) seringkali kesulitan untuk menghadirkan kedua pihak pada saat yang bersamaan</li> <li>- Refocussing anggaran juga menjadi salah satu kendala bagi DPMPSTSP untuk melaksanakan tugas prioritas dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan</li> </ul>
--	--	--	---

			<p>Solusi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk dasar hukum, selalu dilakukan koordinasi dengan Biro Hukum dalam rangka memonitor perkembangan revisi perda dan pergub</li> <li>- Berkoordinasi dengan Diskominfo dan kementerian Investasi/BKPM terkait jaringan</li> <li>- Mengajukan perubahan/penambahan anggaran kepada Tim TAPD untuk pengalokasian anggaran untuk pemenuhan komponen standar pelayanan</li> <li>- Berkoordinasi dengan Kementerian Investasi/BKPM, Kementerian Dalam Negeri, dan BPSDM untuk lebih memperbanyak kegiatan yang berkaitan dengan Peningkatan Kapasitas/Diklat SDM bagi penyelenggara perizinan</li> <li>- Berkoordinasi dengan BKD terkait usulan penambahan SDM di DPMPTSP Provinsi Kalimantan Barat</li> <li>- Melakukan koordinasi intensif dengan Perangkat Daerah terkit untuk membahas regulasi yang tidak sinkron atau saling mengunci</li> </ul>
--	--	--	--

			Akan selalu memberikan fasilitas terkait pengaduan tentang pelayanan perizinan dan nonperizinan secara bertahap
--	--	--	---

## BAB IV PENUTUP

Sebagai penutup dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kalimantan Barat Akhir Tahun Anggaran 2023 dapat disampaikan bahwa kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Barat mengalami peningkatan berkenaan dengan realisasi kinerja dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan meskipun ada kinerja yang belum tercapai secara maksimal.

Capaian kinerja penanaman modal diukur berdasarkan data realisasi investasi periode Januari – Desember 2023 yang telah mencapai angka Rp. 26.90 Triliun dengan rincian untuk realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp. 19.64 Triliun dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp. 7.26 Triliun. Jumlah nilai investasi sebesar Rp. 26.90 Triliun sampai dengan Tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 33.96 % apabila dibandingkan dengan realisasi investasi tahun 2022 sebesar Rp. 20.08 Triliun.

Pada kesempatan ini juga kami ingin menyampaikan penghargaan yang telah diterima oleh DPMPTSP Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2023 sebagai hasil dalam pencapaian kinerja yaitu sebagai berikut :

1. Penghargaan dari Gubernur Kalimantan Barat atas Prestasinya Memperoleh Top 10 SIVABLIK dalam Pelaksanaan Kompetensi Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 yang Dianugerahkan kepada Inovasi “PERIUK (Pelayanan Responsif Izin Usaha Mikro Kecil)”;
2. Penghargaan dari Gubernur Kalimantan Barat atas Keberhasilan Pencapaian 100% dalam Pelaksanaan Pemenuhan Indikator dan Sub Indikator Area Intervensi Perizinan *Monitoring Center For Prevention* (MCP) Aksi Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2022;
3. Penghargaan dari Gubernur Kalimantan Barat atas Peraihan Hasil Evaluasi penyelenggaraan Pelayanan Publik berupa Indeks Pelayanan Publik (IIP) dari Kementerian PAN dan RB Tahun 2022 dengan Nilai 4,46 atau Predikat A (Sangat Baik) dan Penilaian Kepatuhan Standar pelayanan Publik dari Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2022 dengan Nilai 87,57 atau Predikat B (Kualitas Tinggi);
4. Penghargaan dari Pj. Gubernur Kalimantan Barat sebagai Perangkat Daerah yang Berperan Aktif dan telah Menyesuaikan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat sampai dengan Semester II Tahun Anggaran 2023 dengan Presentase 100%;

5. Penghargaan dari Pj. Gubernur Kalimantan Barat atas Peraih Memperoleh Peringkat 4 dalam Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023 dengan Nilai Memuaskan atau Predikat A.

Secara ringkas seluruh capaian kinerja, saran dan masukan serta penghargaan yang diterima oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat menjadi pemacu untuk dapat mempertahankan kondisi yang sudah baik dan lebih meningkatkan kinerja yang masih kurang di masa yang akan datang.

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2023 ini dibuat sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat.

Pontianak, Januari 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan terpadu Satu Pintu,



Hendra, S.Sos  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19680925 198908 1 001